

APRESIASI DOSEN PRODI SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN-SU MEDAN TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

Syofiaty Lubis

Syofiatylubis@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syafanikiya@gmail.com

Abstract

The simultaneous regional head elections held in 2018 were one of the largest elections that took place in Indonesia, one of which was in North Sumatra. Its implementation is certainly full of interests for the elected regional head candidates and therefore sometimes they ignore ethics in the process. Practical necessity gives the impression on politics that achieving a goal must justify all means. In Islam, political ethics must be built as a guide for leaders in order to be more sensitive to the needs and benefits of the people. The establishment of good political ethics will give the impression that the authorities uphold the values of justice. In this study, the main focus is to know the appreciation of lecturers in the Siyazah study program at the Faculty of Sharia and Law at UIN North Sumatra Medan for the implementation of Islamic political ethics which took place in the 2018 North Sumatra gubernatorial election.

Keywords: Appreciation, Election, Islamic Political Ethics.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 termasuk sebagai Pilkada terbesar di Indonesia. Dikatakan terbesar paling tidak dapat dilihat dari dua sisi; *Pertama*, Karena Jumlah Pemilih mencapai rekor terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.¹ *Kedua*, karena jumlah daerah penyelenggara Pilkada yang amat besar, yaitu akan digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia, dengan perincian;

¹ Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jumlah pemilih yang akan diperebutkan dalam pilkada serentak 2018 mencapai 158 juta orang atau 80 persen dari jumlah pemilih dalam pemilu nasional 2019 yang diperkirakan mencapai 197 juta orang. Harian Kompas, Selasa, 7/11/2017

diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dalam hal ini termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Isu Pilkada Sumatera Utara, termasuk Pilkada serentak tahun 2018 menjadi perhatian penting karena tahapannya telah dimulai sejak awal Januari tahun 2018. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 telah diatur sebagai berikut.

Pendaftaran Pasangan Calon

1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018

Masa Kampanye

1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018

Laporan dan Audit Dana Kampanye

1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018

Pemungutan dan Penghitungan

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018

Ada tanda-tanda bahwa model Pilkada era kekinian di Indonesia telah berubah dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, terutama ketika masyarakat Indonesia mengabaikan norma politik elektoral tradisional Timur yang santun dan bersahaja. Sebagai contoh konkrit terlihat dari hiruk pikuk Pilkada DKI di Jakarta yang sangat melelahkan, mencemaskan, mencekam dan berkesan negatif. Di wilayah lain di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, realitas sejarah ini bukan tidak mungkin terjadi, bahkan intensitasnya bisa saja meningkat pesat.

Mahasiswa dan dosen merupakan pegiat dan pejuang dari dunia akademisi tentu harus mampu menilai perjalanan demokrasi di Indonesia. secara pasti pentas demokrasi di Indonesia tidak akan pernah surut karena mayoritas seluruh negara di dunia ini menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Mahasiswa diminta untuk peka terhadap realitas politik yang terjadi agar mampu menjadi penyelamat sekaligus pencerah masa depan bangsa. Begitupula dengan refleksi ke depan atas pelaksanaan pemilihan pemimpin, tentu mahasiswa harus mengedepankan sisi akademisnya.

Mahasiswa harus mampu memberi kontribusi nyata dalam nuansa perjuangan kepada masyarakat bahwa pemimpin merupakan satu amanah yang diberikan kepada seseorang dalam memimpin dan mengatur rakyat. Jika pemimpin lalai dan hanya memikirkan kepentingan pribadi hingga akhirnya sebuah pemerintah sudah jauh dari nilai etika, maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami kehancuran, dia tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat, akhirnya rakyat yang menjadi sasaran. Pada akhirnya mereka apatis terhadap rakyat dan tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Mahasiswa harus bersatu dengan suara lantang dan menjadi yang terdepan jika hal ini terjadi. Bila mahasiswa mengemban dari sisi perjuangan, lain halnya dengan dosen. Ia tidak hanya sekedar memberi pencerahan kepada masyarakat melalui wacana dan informasi teoritis, namun juga harus mampu lebih menunjukkan identitas diri sebagai personal yang tahu seluk beluk mengenai sosok calon pemimpin, watak dan sifat hingga perilakunya secara objektif yang mungkin saja berimbas pada daerah tertentu kepada masyarakat agar tidak kebablasan dalam memilih pemimpin yang akan menjabat dalam kurun waktu yang tidak sebentar.

Etika politik dan moral para pemimpin Islam dan di luar Islam sangat bergantung pada otoritas yang ada. Oleh karena itu, mereka yang ingin membangun pemerintahan yang adil dan beretika harus belajar sembari mengarungi dunia nyata dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi terciptanya perdamaian. Pemerintahan yang tidak dilandasi akhlak dan nilai moral yang baik dapat menimbulkan kebingungan. Apalagi, pemimpin yang tidak menanamkan nilai moral pasti akan menghancurkan

kekuasaannya. Oleh karena itu, penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan, bukan sebaliknya.²

Kondisi kepemimpinan tidak boleh berlebihan dalam dunia politik aktual yang terkesan tidak bermoral karena yang dicari orang adalah sudut pandang yang didasarkan pada pemimpin, itu adalah keinginan untuk mencapai tujuan politik. Dalam Islam, para pemikir muslim telah mengembangkan etika politik, seperti Ibnu Abi Rabbi, Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibn Tamiyah yang dapat digunakan untuk refleksi, acuan dan evaluasi termasuk materi politik kehidupan politik yang ada. Kehidupan di Indonesia secara praktis telah diterapkan di panggung politik dengan berbagai tafsir. Pada saat yang bersamaan, diharapkan melalui etika politik, kehidupan politik yang ada menjadi lebih santun dan membawa manfaat bagi masyarakat.³

Keterlibatan dosen yang bernaung dalam hukum dan politik tentu menjadi modal utama dalam melihat dan menganalisa perjalanan demokrasi melalui pemilu yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Begitupula dengan apresiasi dosen prodi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (FSH UIN-SU) dalam hal ini menjadi cukup penting dan strategis sejalan dengan kapasitas mereka sebagai pemegang otoritas akademik pengkaji dan penggiat kajian etika politik Islam di Indonesia (dalam hal ini di Sumatera Utara).

Konflik dalam setiap pilkada selalu ada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, potensi konflik pilkada serentak di tahun 2018 sangat tinggi. Hal itu dimungkinkan, mengingat adanya kecemasan pengabaian akan etika politik dan implementasinya di lapangan, sementara di sisi lain Pilkada tahun ini sebagai Pilkada terbesar, baik ditinjau dari aspek jumlah pemilih yang akan direbutkan suaranya, sekitar 80 persen dari total pemilih Nasional yang akan diperebutkan oleh peserta pemilu 2018, di mana jaraknya berdekatan dengan Pemilu Presiden. Demikian juga dari segi jumlah daerah penyelenggara Pilkada mencapai 171 daerah, yaitu sekitar sepertiga jumlah seluruh daerah di Indonesia. Bahkan dana (uang yang berputar) untuk keperluan ini diperkirakan mencapai puluhan trilliun.⁴ Dengan berbagai faktor tersebut, tentu sangat kental terlihat bagaimana implementasi nyata etika politik Islam dalam Pilkada serentak tahun 2018, termasuk pemilihan gubernur Sumatera Utara khususnya.

² M. Tahir Maloko, "Etika Politik dalam Islam", dalam Jurnal ad-Daulah Vol. 1 No. 2 Juni 2013, h. 50.

³ Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik dalam Islam", dalam Jurnal Wahana Akademika, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, h. 89.

⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20171107/15/706935/ketua-kpu-potensi-konflik-pada-pilkada-serentak-2018-lebih-besar>.

Tentu, apresiasi dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur Sumatera Utara akan mencakup sejak awal masa pencalonan para tokoh hingga berakhirnya pemilu. Dengan melihat sejauh mana penerapan etika politik pada masing-masing tokoh dalam menggambarkan kualitas mereka menjadi pemimpin. Apresiasi juga mencakup pada peranan dosen prodi Siyasah FSH UIN-SU bagi masyarakat di masa pemilihan gubernur Sumatera Utara. Inilah yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan artikel.

METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan artikel ini terkategori kepada jenis pendekatan penelitian kualitatif, sehingga sesuai dengan prinsipnya ingin memberikan, menerangkan dan mendeskripsikan secara lugas dan kritis sehingga didapati makna dalam konteks yang sebenarnya. Upaya untuk memahami tentang etika politik Islam dalam Pilkada sembari menilik kepada apresiasi dosen prodi Siyasah FSH UIN-SU, perlu disusun secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian yang terstruktur. Kemudian artikel ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam paparannya akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif. Dengan demikian artikel ini akan mendeskripsikan temuan yang ada secara gamblang dan terukur setingkat paparan atau angka dalam makna kualitas.

Dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU berjumlah 15 orang. Rinciannya adalah delapan orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Tujuh diantaranya adalah dosen yang bergelut dibidang hukum, politik dan politik Islam. Dengan teknik pengumpulan data sesuai prosedur, artikel ini diharapkan mampu menjawab tujuannya yakni mengetahui apresiasi dosen prodi Siyasah FSH UIN-SU terhadap implementasi etika politik Islam dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK ISLAM

Etika politik Islam terdiri dari tiga suku kata; etika, politik dan Islam. Pada awalnya, frasa ketiga suku kata ini familiar terdengar dalam gabungan membentuk kalimat dengan sebutan “etika politik” dan “politik Islam”. Kemudian, kedua kalimat tersebut digabungkan dan memiliki arti tersendiri lainnya. Etika berasal dari kata Yunani, *ethos* yang memiliki arti kandang, padang rumput, adat watak, kebiasaan, sikap dan cara berfikir.⁵ Secara istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika diterjemahkan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral.⁶ Etika seringkali menjadi identitas dalam menunjukkan nilai dan moral yang menjadi pegangan seseorang dalam berperilaku. Pada penerapannya, etika

⁵ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 4.

⁶ KBBI offline, lihat kata “etika”

memberi ilmu tentang bagaimana seharusnya seorang berbuat kepada sesama berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan harus berupaya menghindari diri dari hal yang menimbulkan efek buruk padanya.⁷

Kata Politik dapat ditemukan berbagai bentuk derivasinya yang senada antar satu bahasa dengan bahasa lainnya. Misalnya, dalam bahasa Inggris, *politic* yang bermakna “*acting or judging wisely*” (berlaku bijaksana).⁸ Dalam bahasa Yunani, *politicus* berasal dari kata *polis* yang bermakna kota.⁹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik adalah “segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu wilayah/negara terhadap wilayah/negara lain”¹⁰

Dalam metode penekanan kekuatan, rumus klasik Laswell dapat digunakan. Raswell mendefinisikan politik sebagai “siapa yang bisa mendapatkannya, kapan dan bagaimana” (Goodin dan Hans-Dieter Klingemann 1996: 8). Dalam pandangan Laswell, politik diartikan sebagai aktivitas dimana orang mendapatkan apa (barang dan jasa), kapan dan bagaimana. Dalam metode pengambilan keputusan, politik diartikan sebagai proses di mana kelompok membuat keputusan kolektif (Axford dan Gary K. Browning 2002: 2). Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Budiardjo (1992: 8) Budiardjo (1992: 8) memahami politik sebagai berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara), yang meliputi penentuan tujuan sistem dan proses pencapaian tujuan tersebut.¹¹

Islam mengenal politik dengan istilah lain, yakni disebut siyasah. Dalam lisan arab, pengertian siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara mendatangkan kemaslahatan atau membuat kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang selamat.¹² Siyasah artinya kewajiban untuk menangani masyarakat dan membawa kepada kemashlahatan atau dengan kata lain mengurus persoalan umat dan menyelesaikannya dengan hasil yang membawa kemahslahatan padanya.

Berdasarkan uraian tentang etika dan politik di atas, dapat disimpulkan bahwa etika politik merupakan kumpulan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, yang membawa manfaat melalui etika dan pedoman sesuai dengan kepentingan hak dan kewajiban yang diemban. Orientasi etika politik tidak boleh diabaikan dalam menilai kelayakan kualitas dan tatanan kehidupan politik, karena pada dasarnya fokus utama

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 6.

⁸ Eko Handoyo dkk, *Etika Politik*, (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 35.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ KBBI Offline, lihat “politik”

¹¹ Eko Handoyo dkk, *Etika Politik*, h. 36.

¹² Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari bin Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz VI, (Beirut: Dar Masyriq, 1968), h. 108.

etika politik bagaimana menghasilkan legitimasi kekuasaan yang etis/layak. Siapapun yang mengemban amanah tersebut, jika ia menjadi seorang pemimpin/penguasa, maka tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kekuasaannya karena bila ia tidak mampu memenuhinya, ia dianggap gagal dan kekuasaannya dianggap tidak sah.

Sejauh ini, kelayakan kepemimpinan seseorang memang lebih tepat rasanya jika dilihat dari sisi etika dan moral. Apalagi jika menilik kepada sejarah bahwa runtuhnya kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya bermula pada kondisi keterpurukan mental pemimpin yang cenderung membawa dampak buruk pada masa pemerintahannya. Namun sayangnya, aspek kelayakan inilah yang ditinggalkan para pemimpin tatkala kekuasaan telah direngkuh.

Etika politik dari perspektif Fiqh Siyasah termasuk dalam ranah Siyasah Dusturiyah karena mengatur hubungan antara warga negara dengan suatu lembaga negara dan warga negara serta lembaga negara lainnya dalam lingkup administrasi suatu negara. Dalam rangka mempersempit ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah, etika politik dimasukkan dalam bidang Siyasah Tasri'iyah karena termasuk masalah *ahlul halli wal aqdi* yang merepresentasikan persoalan rakyat, hubungan muslim dalam suatu negara, seperti konstitusi, hukum, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dll.¹³

Etika politik dipandang sebagai suatu keharusan dalam Islam. Ini karena Islam memperlakukan segala sesuatu sebagai bentuk ibadah yang dikembalikan sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi sudah seharusnya dalam berpolitik umat Islam harus memperhatikan segala bentuk etika politik yang telah diatur. Etika politik Islam tentu berbeda dengan etika politik pada umumnya karena etika politik Islam memiliki landasan sakral yakni Alquran sebagai wahyu dan Hadis sebagai Sunnah Rasul yang harus diikuti.

Pemimpin sesungguhnya memainkan peran yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat. Ada perumpamaan "rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya". Semuanya itu membuktikan kesimpulan bahwa pemimpin adalah panutan dan teladan. Contoh yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitu juga sebaliknya. Menurut Al-Ghazali, agar pemimpin tetap pada koridornya, ulama harus menjaga fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi dan penegak politik keadilan. Para ulama dan cendekiawan harus bersikap mawas diri serta tidak tunduk kepada tirani (zalim terhadap kehormatan dan hak asasi manusia, zalim terhadap harta benda rakyat, dan zalim terhadap jiwa rakyat). bila perlu, seorang ulama dalam menjaga

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, ed, revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 31.

keutuhan mmashlahat, ia harus mengambil sikap uzlah sembari menjauhkan diri dari segala soal yang berbau politik dan pemerintah.¹⁴

Menurut Abdul Wahhab Khalaf dalam teori Islamnya, etika politik pada seorang pemimpin cenderung bagaimana cara mengelola negara menuju kemashlahatan tanpa dibarengi dengan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu supaya terhindar dari kemudaratan. Dengan kata lain pemimpin/penguasa harus mampu mengelola persoalan umum dengan bijaksana berdasarkan nash-nash Alquran dan Hadis serta prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang sejalan dengan kepentingan umum.¹⁵

Al-Mawardi menyebut bahwa Islam tidak pernah memberi jurang pemisah "gap" antara politik dengan etika atau moral. Pelaksanaannya justru dipadukan sebaik mungkin. Maka dari itu setiap kekuasaan politik wajib dilaksanakan penuh perhitungan moral atas dasar agama. Setiap perbuatan politik pemimpin/penguasa harus selaras dengan agama. Dengan demikian, setiap kekuasaan dalam tindakannya harus mempunyai nilai-nilai etika/moral yang tinggi sebagai perwujudan agama. Efeknya bagi masyarakat adalah kebahagiaan dan keadilan secara merata.¹⁶ Hal ini diperkuat oleh pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa dalam Islam etika merupakan bagian dari akhlak yang menjadi manifestasi dalam segala tindakan manusia, termasuk praktik politik.¹⁷

Islam sejatinya tidak luput memberi kaidah dan jalan yang baik bagi umatnya dalam menjalani kehidupan, termasuk konsep-konsep etika politik. Nash Alquran sebagai pedoman tentu sudah banyak menyiratkan pentingnya hubungan hidup manusia yang baik. Allah berfirman:

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Isi ayat di atas menjelaskan tentang etika dan moral (akhlak) kepemimpinan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk mendapatkan simpati dan dukungan serta partisipasi umat. Diantaranya adalah memiliki

¹⁴ Ahmad Mubarak dan B. Wiwoho, *Etika dan Moral Kepemimpinan*, Cet. I, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2003), h. 22.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 5.

¹⁶ Al-Mawardi, *Tashil Nazhar wa Ta'fil al-Zhafar*, (Beirut: Dar al-Nahdhah, 1981), h. 24.

¹⁷ Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jundi, 1518H), h. 195.

sifat lemah lembut dan tidak berkata atau berbuat kasar, serta memberi keringanan dan kemudahan bagi masyarakat. Sifat seperti inilah yang akan menjadi modal seorang pemimpin untuk memproyeksikan kemampuannya dalam berperilaku sehingga akan memberi rangsangan dan memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan pula. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan mencemooh serta sulit menerima setiap kebijakan dan bersikap acuh terhadap kepemimpinan tersebut.¹⁸

Alquran sebagai sumber utama ide-ide etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya tindak tanduk rakyat sangat tergantung pada kebijakan penguasa. Rakyat beretika atau tidak terpulang bagaimana pemimpinnya. Thahir Maloko mengatakan “Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Alquran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat”¹⁹

APRESIASI DOSEN PRODI SIYASAH FSH UIN-SU TERHADAP PILGUBSU TAHUN 2018

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2018. Pelaksanaannya mengikuti jadwal pilkada serentak dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 sebanyak 9.052.529 jiwa. DPT diputuskan di Medan, Sabtu (21/4/2018), melalui rapat pleno yang dihadiri anggota KPU dari 33 kabupaten/kota. DPT tersebut terdiri atas 4.485.964 pemilih laki-laki dan 4.566.565 pemilih perempuan, yang akan mencoblos di 27.478 Tempat Pemungutan Suara (TPS).²⁰

Pada rapat pleno tersebut, tercatat jumlah pemilih yang terhitung sebagai Daftar Pemilih Tetap Pilkada Sumut 2018 paling banyak berada di Kota Medan dengan jumlah 1.520.301 jiwa, dan Kabupaten Deliserdang 1.165.765 jiwa. Daerah yang paling sedikit pemilihnya adalah Kabupaten Pakpak Barat dengan 31.824 jiwa dan Kabupaten Nias Barat dengan 56.718 jiwa.²¹ Dari perbaikan yang dilakukan KPU, jumlah pemilih pada Pilkada

¹⁸ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁹ M. Thahir Maloko, “Etika Politik dalam Islam”, h. 57.

²⁰ <https://www.tagar.id/inilah-dpt-pilgub-sumut-2018-yang-ditetapkan-kpu>

²¹ *Ibid.*

Sumut 2018 tersebut berkurang 150.438 orang dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 9.202.967 jiwa, yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2018.²² Total keseluruhan DPS dapat dilihat dalam tabel.

Tabel. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No	DAERAH	Jumlah DPT
1	ASAHAN	487.331
2	BATU BARA	284.231
3	DAIRI	190.979
4	DELI SERDANG	1.170.543
5	HUMBANG HASUNDUTAN	123.716
6	KARO	238.296
7	KOTA BINJAI	176.781
8	KOTA GUNUNGSITOLI	84.485
9	KOTA MEDAN	1.513.835
10	KOTA PADANG SIDIMPUAN	136.022
11	KOTA PEMATANGSIANTAR	164.964
12	KOTA SIBOLGA	62.185
13	KOTA TANJUNG BALAI	106.378
14	KOTA TEBING TINGGI	99.970
15	LABUHANBATU	274.350
16	LABUHANBATU SELATAN	183.312
17	LABUHANBATU UTARA	237.951
18	LANGKAT	705.769
19	MANDAILING NATAL	283.096
20	NIAS	90.712
21	NIAS BARAT	56.982
22	NIAS SELATAN	197.323
23	NIAS UTARA	88.779
24	PADANG LAWAS	153.820
25	PADANG LAWAS UTARA	150.824
26	PAKPAK BHARAT	33.421
27	SAMOSIR	90.128
28	SERDANG BEDAGAI	447.873
29	SIMALUNGUN	615.668
30	TAPANULI SELATAN	222.399
31	TAPANULI TENGAH	199.191
32	TAPANULI UTARA	207.241
33	TOBA SAMOSIR	124.412
	JUMLAH	9.202.967

²²Sumber <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/SUMATERA%20UTARA>

Dalam penetapan DPT tersebut, KPU turut mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta tim pemenangan dua pasangan calon gubernur untuk menyaksikan rekapitulasi tersebut.

Gelaran Pilgubsu berlangsung satu hari penuh pada tanggal 27 Juni 2018. Rekapitulasi suara dimulai pada tanggal 28 Juni 2018. Hasilnya, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut.

Dikutip dari rapat pleno KPU Sumut di Medan, Minggu (8/7) malam, KPU mengumumkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa meraih 3.291.137 suara 57,57 persen. Sedangkan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) meraih 2.424.960 suara atau 42,43 persen. Pengumuman hasil penghitungan suara dihadiri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Total suara tidak sah mencapai 90.770 suara.²³

Dengan membandingkan sumber suara, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah memang berada di 17 daerah / kota, sedangkan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus lebih baik di 16 daerah / kota. Namun, Edy-Musa banyak meraih kemenangan di daerah-daerah dengan pemilih besar seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Labuhan Batu.²⁴

Sebelum penghitungan suara final, sejumlah lembaga survei yang melaksanakan hitung cepat atau quick count untuk Pilkada Sumatera Utara 2018 sudah memasukkan 100 persen data dari tempat pemungutan suara (TPS). Berikut data dari empat lembaga survey terkemuka.

Quick count SMRC: Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dinyatakan menang dalam hitung cepat SMRC. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 58,81 persen Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 41,19 persen Populasi dalam quick count ini adalah seluruh pemilih sah yang datang ke 300 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sampel dipilih menggunakan metode stratified cluster random sampling dengan margin of error plus minus 1 persen dan tingkat kepercayaan 99 persen.²⁵

Quick count Indikator: Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul dalam hitung cepat Indikator. Hingga pukul 22.00 WIB, data yg masuk mencapai

²³ <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180708232039-32-312556/kpu-tetapkan-edy-iject-pemenang-pilgub-sumut-2018>

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <https://regional.kompas.com/read/2018/06/27/22530351/ini-hasil-akhir-4-quick-count-pilkada-sumut-edy-musa-tak-terlawan?page=all>

99,67 persen. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 56,64 persen Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 43,36 persen Indikator Politik Indonesia mengambil 300 sampel TPS. Adapun margin of error kurang lebih 1,32 persen, dengan partisipasi pemilih sebesar 62,05 persen.²⁶

Pada Quick count LSI, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dinyatakan menang dalam hitung cepat LSI. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 57,12 persen Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 42,88 persen LSI Denny JA mencatat voter turnout (VTO) mencapai 69,14 persen. Adapun margin of error 1 persen.²⁷

Sedangkan menurut Quick count Charta Politika, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dinyatakan menang dalam hitung cepat Charta Politika. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 59,98 persen Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 40,02 persen.²⁸

Kemenangan pasangan Edy-Musa menurut beberapa pengamat tak lepas dari beberapa faktor, namun faktor yang paling menonjol adalah “kekalahan Djarot” pada Pilgub Jakarta dan “politik identitas” terus menggema dan digaungkan saat Pilkada Sumut.

Politik identitas menjadi warna tersendiri dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Politik identitas ini merembet hingga pada isu jumlah pemilih tambahan yang mendadak membengkak, adanya istilah “pocong” gentayangan mengkampanyekan antigolput dan spanduk larangan pilih pemimpin kafir. Hingga pada akhirnya muncul belakangan mengenai himbuan memilih putra daerah.

Pada dasarnya pertarungan politik di Sumatra Utara memang tak bisa lepas dari rasa kedaerahan. Faktor putra daerah dianggap cenderung memiliki kepentingan tersendiri oleh sebagian besar masyarakat Sumut. Sejatinya kedua pasangan pemilihan Gubernur Sumut tidak satupun yang menyandang “putra daerah” asli. Adapun pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang digadang-gadang sebagai putra daerah hanya mengacu setidaknya pernah tinggal dan besar di Sumut meski tak lahir di provinsi itu. Sementara lawannya, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dianggapnya sebagai “pendatang” karena keduanya kelahiran luar Sumut.

Isu putra daerah relatif baru di Sumatera Utara. Pengamat politik Henri Sitorus dari Universitas Sumatera Utara menjelaskan, saat Gatot Pujo Nugroho dari Provinsi Jawa Tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2013, masalah putra daerah tidak ada. Dalam pemilihan kali ini, Edy yang lahir di Aceh bekerja sama dengan Musa yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

lahir di Medan dan beragama Islam, dianggap lebih meyakinkan dalam hal politik identitas kesumateraan bila dibandingkan dengan Djarot yang seorang Jawa dan Muslim dengan pasangannya Sihar Sitorus yang seorang pengusaha Batak kelahiran Jakarta.²⁹

Menurut pengamatan penulis, isu putra daerah sebagai politik identitas merupakan strategi dari kampanye salah satu pasangan. Memang secara fakta, calon yang kelahirannya berasal dari Sumatera Utara adalah hanya Musa, sedangkan yang lain tidak. Berbekal politik identitas ini, disamping dengan adanya isu dari mayoritas penduduk muslim yang melarang memilih pemimpin non muslim, hal tersebut menjadi senjata utama salah satu pasangan dalam memenangkan suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara.

Terlepas dengan isu putra daerah, pelaksanaan Pilgubsu tahun 2018 mendapat apresiasi baik dari masyarakat umum maupun kalangan akademisi seperti dosen. Meskipun faktanya hanya 61.78%³⁰ pemilih yang menggunakan hak pilihnya, setidaknya ada beberapa catatan penting yang dapat dianalisa pada saat pelaksanaan pilgubsu tahun 2018.

1. Isu-isu kepada setiap pasangan sebelum pemilihan menerpa seiring menuju hari H pencoblosan. Pada pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, isu kemiliteran sempat menggema dan menjadi kekhawatiran. Terjunnya seorang eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) di dunia politik ini sempat dianggap sebagai gejala yang mengarah pada dwifungsi TNI di dunia demokrasi.³¹ Memang, Edy dalam hal ini telah menjamin bakal menjaga netralitas, namun kecemasan masyarakat tetap ada dikarenakan adanya cerminan kepemimpinan militer yang sempat menjadi stigma negatif pada era Presiden Soeharto menjadi Presiden. Meskipun tidak begitu menyeruak, namun tetap menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat.

Sedangkan pada pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, banyak sekali isu yang menerpa diantaranya; isu putra daerah³² dan isu bias Pilkada DKI Jakarta. Khusus persoalan Pilkada DKI Jakarta, Kekalahan pasangan Ahok-Djarot dari pasangan Anies-Sandi pada tahun 2017 berpengaruh besar pada ke"sosok"an Djarot di Sumatera Utara. Kasus yang menimpa ahok terkait penistaan Alquran, memberi dampak kepada Djarot sehingga dengan mudahnya informasi ini

²⁹ Erni Suriyani dan Cut Alma Nuraflah "Peranan Harian Waspada Dalam Menaikkan Elektabilitas Calon Gubernur Sumut" dalam Jurnal Warta edisi 59, Januari 2019, h. 15.

³⁰ Data diambil dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t1/sumatera_utara

³¹<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180627073256-32-309338/penentuan-duel-djarot-dan-edy-rahmayadi-di-pilgub-sumut-2018>,

³² *Ibid.*

disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk menyebarkan isu-isu keagamaan.

2. Pendekatan kepada tokoh agama. Pasangan Edy-Musa menjelang pilkada serentak melakukan pendekatan kepada tokoh agama. Hal ini dia lakukan pada saat lebaran Idul Fitri dimana Edy menggandeng salah seorang tokoh ulama yang sedang naik daun, yakni Ustadz Abdul Somad, Lc, MA (UAS). Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu kepiawaian seorang Edy saat kampanye karena menggandeng seorang yang disukai banyak umat. Maka, hal ini berpengaruh besar kepada animo masyarakat yang senang dengan UAS akan dimanfaatkan untuk menarik suara memilih pasangan Edy-Musa.

Pada saat isu keagamaan menjadi tren “negatif” pada pasangan Djarot-Sihar, justru isu keagamaan menjadi tren “positif” pada pasangan Edy-Musa. Pemanfaatan media untuk menyebarkan isu keagamaan oleh Pasangan Edy-Musa begitu gencar. Setelah UAS, mereka menggandeng Tengku Zulkarnain yang notabene juga orang medan dan banyak pengikutnya. Kemudian pemberitaan tentang pelaksanaan ibadah subuh berjamaah menjelang pencoblosan hingga hari pencoblosan menjadi bagian menguatkan isu keagamaan yang semakin positif disisi Edy-Musa.

3. Upaya sosialisasi dan kampanye KPU melalui media sosial.³³ Partisipasi masyarakat pada pilgubsu tahun 2013 di Sumatera Utara memang sangat rendah, dibawah 50 persen saja. Tentu sangat disayangkan jika suara yang masuk untuk mencoblos kalah jumlah dari yang tidak mencoblos. Maka dari itu, KPU berupaya agar masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2018 tidak mengulang hal yang sama dengan berkampanye melalui medsos. Menurut penulis, sangat riskan jika Pilgubsu 2018 suara pemilih kalah jumlah dengan suara tidak memilih, itu artinya bukan hanya persoalan tingkat partisipasi masyarakat sumut yang rendah, namun memberikan efek berbahaya pada pemimpin terpilih kedepannya. Misalnya adanya bughat (pemakzulan) dan demonstrasi besar-besaran yang sulit dihentikan. Maka dari itu, sosialisasi via medsos diharapkan memberi nuansa baru kepada masyarakat agar semakin tertarik mengikuti pentas demokrasi di Sumatera Utara khususnya.

Kalangan akademisi (dosen) sesungguhnya tidak tinggal diam melihat pentas demokrasi yang terjadi di Sumut. Sejak pasangan calon gubernur-wakil gubernur telah ditentukan, masing-masing akademisi (dosen) mempunyai strategi tersendiri dalam menikmati alur perjalanan Pilgubsu tahun 2018. Dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU juga mengapresiasi pelaksanaan Pilgubsu tahun 2018 dengan sukacita. Ada beberapa catatan dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU terkait apresiasi mereka, khususnya

³³ <https://news.detik.com/berita/d-3799414/warga-sumut-mayoritas-golput-kpu-siapkan-kampanye-di-medsos>

terhadap implementasi etika politik yang terjadi. Apresiasi yang menjadi fokus utama dalam artikel adalah; (1) apresiasi pada prinsip-prinsip keislaman, (2) apresiasi pada pemilihan, (3) apresiasi etika politik pada setiap pasangan, (4) apresiasi amanah kepemimpinan

1. Prinsip-prinsip Islami tercermin dalam perjalanan pilkada gubernur Sumut yang dilangsungkan pada bulan juni 2018, dimana pasangan calon gubernur tidak saling menyikut dalam urusan SARA dan hal-hal yang berbau kepentingan Etnis maupun Agama. Menurut Syuaibun, hal ini pantas diberi apresiasi karena kedua calon gubernur (baik Edy dan Djarot) sama-sama orang Jawa. Menurutnya, keduanya menjaga martabat dan harkat etnis dengan tidak saling menjelekkkan satu sama lain, baik di media massa maupun media sosial. Meskipun pendukung dua kubu berseberangan, konflik yang terjadi sangat minim di setiap sudut daerah menjelang pemilihan.³⁴ Menurut Iqbal Irham, ketiadaan sikut menyikut pada persoalan etnis dan agama sesungguhnya mencerminkan kedua pasangan menjalin baik dirinya dengan agama dan Tuhannya. Ketika seseorang menjalin hubungan baik dengan Tuhannya (dalam ibadah khususnya) tentu akan memberi dampak baik pada sifat dan tingkah laku individunya.³⁵
2. Pada praktiknya, masyarakat di setiap tempat sangat antusias dalam pemilihan gubernur sumatera utara tahun 2018 dengan kehadiran mereka untuk memilih para calon gubernur yang ada. Setidaknya menurut Syuaibun, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa calon gubernur Sumatera Utara kali ini tidak sekedar calon yang fresh, namun sesungguhnya pertarungan yang terjadi pada kedua calon merupakan pertarungan calon pemimpin Sumut yang bukan asli anak daerah.³⁶ begitu juga dengan Afifa Rangkuti³⁷ dan Putri Eka Ramadhani³⁸. Afifa mengatakan bahwa partisipasi di daerahnya berjalan baik dan lancar. Bahkan kedua kubu terlihat menjaga keamanan dan kenyamanan sejak awal pencoblosan hingga penghitungan di masing-TPS nya. sedangkan Putri Eka Ramadhani menyebut bahwa partisipasi pemilih daerah tinggalnya sangat tinggi, bahkan penghitungan suara selesai sampai menjelang tengah malam. Menurutnya, ini menunjukkan antusias masyarakat mulai meningkat lagi sejak pilkada gubernur terakhir tahun 2013.
3. Secara prinsip, etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan

³⁴ Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Syuaibun. 10-07-2018.

³⁵ Wawancara dengan Dosen Tasawuf Prodi Siyasah, M. Iqbal Irham. 13-07-2018

³⁶ Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Syuaibun. 10-07-2018.

³⁷ Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Afifa Rangkuti. 3-07-2018.

³⁸ Wawancara dengan Dosen HAN Prodi Siyasah, Putri Eka Ramadhani. 5-07-2018.

ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan. Maka menurut Fatimah³⁹, hal ini jangan dijadikan sekedar alasan calon pemimpin untuk bertarung memperebutkan kekuasaan demi mendapat suara rakyat semata, namun mereka juga harus mendesak diri mereka juga agar mengubah pribadi yang sesungguhnya mereka adalah orang yang menjaga prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, karena kedua calon pemimpinnya beragama Islam.

4. Terkait amanahnya kedua calon, menurut Adlin⁴⁰, bahwa amanah tidak boleh menjadi kata-kata yang menghiasi telinga masyarakat saja. Ia juga harus ditunjukkan dengan tekad yang bulat pula dari calon pemimpin nantinya, khususnya di Sumatera Utara siapapun itu. Apalagi menurutnya, Alquran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat tercermin dari kebijakan dan bagaimana pemimpinnya. Sedangkan menurut Afifa, untuk mengetahui amanah tidaknya seorang pemimpin jangan dinilai sebelum terpilih, lihat minimal satu tahun setelah terpilih, apakah ia mengayomi masyarakat atau tidak, membuat kebijakan yang pro rakyat atau tidak.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa para dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU lebih khawatir akan implementasi etika politik Islam dicerai oleh pasangan calon gubernur jika nantinya mereka naik menjadi penguasa. Pemimpin secara prinsip adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab atas segala apa yang dipimpinnya tanpa adanya mengelak, menghindar dari setiap kerusakan yang ditimbulkan darinya. Maka dari itu, dalam setiap aktifitas pemilihan pemimpin dimanapun lokasinya menurut Syuaibun, seorang dosen wajib turut terjun dalam implementasi etika politik Islam pada dirinya dan menyertai masing-masing calon pemimpin sebagai bentuk apresiasi.⁴¹ Apresiasi ini mungkin akan berguna bagi masyarakat guna semakin mengetahui sosok calon pemimpin mereka agar tidak salah memilih dan memiliki pemimpin. Dosen harus menjadi jembatan bagi masyarakat dalam penyebaran informasi yang valid terkait calon pimpinan suatu daerah, dalam hal ini di Sumatera Utara.

Dosen juga harus mengajak masyarakat dengan antusias tinggi setiap kali ada pentas demokrasi, bukan sebaliknya. Beberapa oknum sering kali muncul untuk memberi stigma buruk pelaksanaan pemilu. Akibatnya tentu

³⁹ Wawancara dengan Dosen Prodi Siyasah, Fatimah. 11-07-2018.

⁴⁰ Wawancara dengan Dosen Prodi Siyasah, Adlin Budhiawan. 15-07-2018.

⁴¹ Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Syuaibun. 10-07-2018.

sangat berbahaya. Fatimah menyebut, pentas demokrasi dengan pemilihan dari rakyat saat ini merupakan opsi yang baik. Saat satu orang termakan hasutan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka sejatinya ia telah merugi karena ia tidak mengikuti etika berpolitik yang baik. Jika dia seorang muslim, maka sungguh ia lebih rugi karena mengabaikan kebaikan-kebaikan nilai dari Nash Alquran yang menganjurkan untuk taat kepada Pemimpin.⁴²

Menurut Afifa, pentingnya berpolitik sama pentingnya dengan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), karena pada saat menjadi masyarakat, seseorang memiliki hak untuk memberi kehidupan yang baik pada diri dan keluarganya, maka salah satunya adalah memilih pemimpin yang baik pula. Jika ia tidak melihat ciri-ciri sosok calon pemimpin yang unggul dan baik, maka Islam sebenarnya telah memberi kaidah yang sistematis dan prosedural untuk melihat dan mengetahui sosok calon pemimpin tersebut. Inilah pentingnya belajar dan memahami tentang ilmu politik karena Islam sesungguhnya tidak “jijik” dengan politik, justru sebaliknya.⁴³

Pada akhirnya, penulis menilai apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada berjalan dinamis seiring dengan berbagai faktor, baik faktor ekonomi, politik, sosial budaya dan agama tentunya. Sudah seharusnya para pihak yang berkepentingan, salah satunya para akademisi seperti dosen tidak luput memberi informasi yang objektif agar implementasi etika politik Islam yang berjalan di negeri ini semakin membaik kedepannya. Akademisnya seorang dosen tentu jangan sampai tercederai dengan adanya indikasi-indikasi yang tidak benar dari praktik implementasi etika politik Islam dalam setiap pemilihan pemimpin, apalagi pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

PENUTUP

Etika politik Islam sesungguhnya selalu merujuk pada ketentuan nash Alquran dan hadis. Alquran menyerukan agar umatnya untuk berlaku adil jika menjadi pemimpin dan selalu berbuat baik serta berlaku amanah kepada siapapun. Apresiasi dosen Prodi Siyasah FSH UIN-SU terhadap implementasi etika politik Islam pada saat Pilgubsu tahun 2018 cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan kehadiran responden 100% saat pemilihan kepala daerah berlangsung dan menggunakan hak pilihnya. Kemudian praktik politik kotor yang dikhawatirkan terjadi pada beberapa wilayah, ternyata minim terjadi. Meskipun di beberapa titik terjadi persoalan-persoalan terkait Tim Sukses dari kedua calon, namun keterangan dari para dosen Prodi Siyasah FSH Uin-SU terkait penyalahgunaan etika politik yang terjadi di masing-masing daerah sangatlah rendah, bahkan hampir tidak ada.

⁴² Wawancara dengan Dosen Prodi Siyasah, Fatimah. 11-07-2018.

⁴³ Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Afifa Rangkuti. 3-07-2018.

Terkait implementasi etika politik Islam dalam pilkada sesungguhnya merupakan bentuk ijtihad yang terbaik dalam memilih seorang pemimpin. Meskipun secara pasti, metode pemilihan umum tidak banyak ditemui dalam sejarah Islam, namun sisi baiknya adalah seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama di mata hukum untuk membuktikan siapa sesungguhnya yang layak menjadi pemimpin dalam suatu daerah apabila terjadi pilkada. Namun yang harus diingat, bahwa apresiasi terhadap implementasi etika politik Islam jangan hanya pada saat pencalonan, bahkan apabila seseorang telah terpilih, masyarakat berhak untuk mempertanyakan implementasi etika politik Islam tersebut kepada yang terpilih selama ia telah menjabat menjadi gubernur nantinya, dan hal ini tidak boleh dilarang dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mubarak dan B. Wiwoho. 2003. *Etika dan Moral Kepemimpinan*. Cet. I. Jakarta: PT. Bina Bertens, K. 2005. *Etika* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eko Handoyo dkk. 2016. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya Press.
- Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari bin. 1968. *Lisan al-Arab*, Juz VI, Beirut: Dar Masyriq.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rena Pariwisata, 2003.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Mawardi, *Tashil Nazhar wa Ta'fil al-Zhafar*, (Beirut: Dar al-Nahdhah, 1981), h. 24.
- Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jundi, 1518H), h. 195.
- Salim, Abdul Muin. 2002. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Erni Suriyani dan Cut Alma Nuraflah "Peranan Harian Waspada Dalam Menaikkan Elektabilitas Calon Gubernur Sumut". Jurnal Warta edisi 59. (Januari 2019).

In'amuzzahidin, Muh. "Etika Politik dalam Islam", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015). 89-106.

Maloko, M. Tahir. "Etika Politik dalam Islam", *Jurnal ad-Daulah* Vol. 1 No. 2 (Juni 2013). 50-59.

Website

<https://kabar24.bisnis.com/read/20171107/15/706935/ketua-kpu-potensi-konflik-pada-pilkada-serentak-2018-lebih-besar>.

<https://www.tagar.id/inilah-dpt-pilgub-sumut-2018-yang-ditetapkan-kpu>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/SUMATERA%20UTARA>

<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180708232039-32-312556/kpu-tetapkan-edy-iject-pemenang-pilgub-sumut-2018>

<https://regional.kompas.com/read/2018/06/27/22530351/ini-hasil-akhir-4-quick-count-pilkada-sumut-edy-musa-tak-terlawan?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180627073256-32-309338/penentuan-duel-djarot-dan-edy-rahmayadi-di-pilgub-sumut-2018>

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t1/sumatera_utara

<https://news.detik.com/berita/d-3799414/warga-sumut-mayoritas-golput-kpu-siapkan-kampanye-di-medsos>

Wawancara

Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Afifa Rangkuti. 3-07-2018.

Wawancara dengan Dosen HAN Prodi Siyasah, Putri Eka Ramadhani. 5-07-2018.

Wawancara dengan Dosen HTN Prodi Siyasah, Syuaibun. 10-07-2018.

Wawancara dengan Dosen Prodi Siyasah, Fatimah. 11-07-2018.

Wawancara dengan Dosen Tasawuf Prodi Siyasah, M. Iqbal Irham. 13-07-2018

Wawancara dengan Dosen Prodi Siyasah, Adlin Budhiawan. 15-07-2018.

KBBI offline